



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

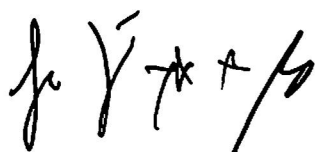
**PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

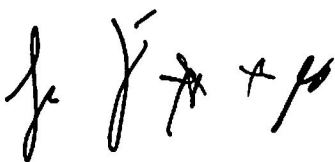
BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

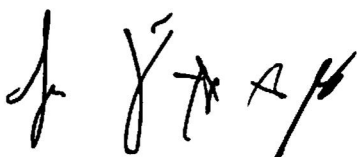
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Seruyan.




6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

15. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
16. Bagian Hasil secara Proporsional yang selanjutnya disingkat BHP.
17. Bagian Hasil Merata kepada seluruh Desa BHM.
18. Bagian Hasil yang diterima oleh masing-masing Desa, yang selanjutnya disingkat BHPx.

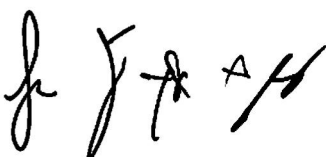
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kejelasan tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Penyaluran;
 - c. Penggunaan; dan
 - d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp6.180.421.550,00 (*Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).



- (3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp5.674.065.084,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah*); dan
 - Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp506.356.466,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 4

- (1) Penetapan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 60% (*Enam Puluh Persen*) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - 40% (*Empat Puluh Persen*) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa.

- (2) Penetapan 60% (*Enam Puluh Persen*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dihitung dengan rumusan:

$$\text{BHM} = 60\% \times \frac{\text{Total Bagi Hasil Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah desa}}$$

BHM = Bagian Hasil Merata

- (3) Penetapan 40% (*Empat Puluh Persen*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumusan:

$$\text{BHP} = 40\% \times \text{Total Bagi Hasil Tahun Berjalan}$$

BHP Bagian Hasil Proporsional

- (4) Rincian penetapan proporsional sebesar 40% (*Empat Puluh Persen*) berasal dari:
- 75% (*Tujuh Puluh Lima Persen*) berasal dari penetapan PBB-P2 tahun sebelumnya pada masing-masing desa; dan
 - 25% (*Dua Puluh Lima Persen*) berasal dari penetapan pajak sarang burung walet tahun berjalan pada masing-masing desa.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumusan:

a. Rumus perhitungan proporsional dari PBB-P2:

$$\text{BHPx} = \frac{\text{Penetapan PBB-P2 dari Desa}}{\text{Total Penetapan PBB-P2 Desa di Daerah}} \times \text{BHP}$$

BHPx = Bagi Hasil yang diterima oleh masing-masing Desa

b. Rumus perhitungan proporsional dari Pajak Sarang Burung Walet:

$$\text{BHPx} = \frac{\text{Penetapan Pajak Sarang Burung Walet dari Desa}}{\text{Total Penetapan Pajak Sarang Burung Walet di Daerah}} \times \text{BHP}$$

(6) Rincian Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyaluran kurang bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk triwulan IV tahun sebelumnya disalurkan pada tahun berjalan; dan
 - b. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahun berjalan disalurkan pada triwulan IV tahun berjalan.
- (3) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahunnya dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Kekurangan atas penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa tahun anggaran 2022 diakui sebagaimana utang bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya setelah audit/reviu Inspektorat Daerah.

- (5) Besaran penyaluran bagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN

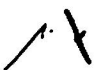
Pasal 6

- (1) Kegiatan yang didanai oleh bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk kegiatan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan penyediaan sarana/ prasarana desa yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Bagian Hasil Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pelatihan, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI SERUYAN,


YULHAIDIR

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR²¹

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBID	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA:	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERUYAN
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	DATA PBB P2 TAHUN 2022*) (Rp)	DATA TARGET PAJAK SARANG BURUNG WALET TA. 2023 (Rp)	PENETAPAN DBH 2023							
					PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			TOTAL	
					60%	40%	JUMLAH	60%	40%	JUMLAH		
1	SERUYAN HILIR	SUNGAI PERLU	3.952.839,00	6.250.000,00	35.097.309,00	2.222.547,00	9.456.775,00	46.776.631,00	3.132.101,00	264.455,00	3.396.556,00	50.173.187,00
		PEMATANG LIMAU	100.622.847,00	6.250.000,00	35.097.309,00	56.576.817,00	9.456.775,00	101.130.901,00	3.132.101,00	6.731.925,00	9.864.026,00	110.994.927,00
		TANJUNG RANGAS	13.624.666,00	6.250.000,00	35.097.309,00	7.660.688,00	9.456.775,00	52.214.772,00	3.132.101,00	911.524,00	4.043.625,00	56.258.397,00
		MUARA DUA	1.928.717,00	6.250.000,00	35.097.309,00	1.084.452,00	9.456.775,00	45.638.536,00	3.132.101,00	129.036,00	3.261.137,00	48.899.673,00
		JAHITAN	52.921.824,00	6.250.000,00	35.097.309,00	29.756.148,00	9.456.775,00	74.310.232,00	3.132.101,00	3.540.605,00	6.672.706,00	80.982.938,00
		BAUNG	49.002.490,00	6.250.000,00	35.097.309,00	27.552.440,00	9.456.775,00	72.106.524,00	3.132.101,00	3.278.391,00	6.410.492,00	78.517.016,00
		PERSIL RAYA	24.657.223,00	6.250.000,00	35.097.309,00	13.863.921,00	9.456.775,00	58.418.005,00	3.132.101,00	1.649.631,00	4.781.732,00	63.199.737,00
		SUNGAI UNDANG	26.711.136,00	6.250.000,00	35.097.309,00	15.018.766,00	9.456.775,00	59.572.850,00	3.132.101,00	1.787.043,00	4.919.144,00	64.491.994,00
		SUBTOTAL	273.421.742,00	50.000.000,00	280.778.472,00	153.735.779,00	75.654.200,00	510.168.451,00	25.056.808,00	18.292.610,00	43.349.418,00	553.517.869,00
2	SERUYAN HILIR TIMUR	MEKAR INDAH	10.191.618,00	5.000.000,00	35.097.309,00	5.730.401,00	7.565.420,00	48.393.130,00	3.132.101,00	681.845,00	3.813.946,00	52.207.076,00
		HALIMAUNG JAYA	63.454.329,00	5.000.000,00	35.097.309,00	35.678.219,00	7.565.420,00	78.340.948,00	3.132.101,00	4.245.256,00	7.377.357,00	85.718.305,00
		BANGUN HARJA	17.257.670,00	5.000.000,00	35.097.309,00	9.703.403,00	7.565.420,00	52.366.132,00	3.132.101,00	1.154.582,00	4.286.683,00	56.652.815,00
		KARTIKA BHAKTI	48.183.191,00	5.000.000,00	35.097.309,00	27.091.775,00	7.565.420,00	69.754.504,00	3.132.101,00	3.223.578,00	6.355.679,00	76.110.183,00
		SUNGAI BAKAU	42.900.320,00	5.000.000,00	35.097.309,00	24.121.396,00	7.565.420,00	66.784.125,00	3.132.101,00	2.870.140,00	6.002.241,00	72.786.366,00
		PEMATANG PANJANG	22.482.006,00	5.000.000,00	35.097.309,00	12.640.870,00	7.565.420,00	55.303.599,00	3.132.101,00	1.504.103,00	4.636.204,00	59.939.803,00
			SUBTOTAL	204.469.134,00	30.000.000,00	210.583.854,00	114.966.064,00	45.392.520,00	370.942.438,00	18.792.606,00	13.679.504,00	32.472.110,00
3	SERUYAN RAYA	TERAWAN	70.816.474,00	6.000.000,00	35.097.309,00	39.817.704,00	9.078.504,00	83.993.517,00	3.132.101,00	4.737.803,00	7.869.904,00	91.863.421,00
		SELUNUK	24.302.856,00	6.000.000,00	35.097.309,00	13.664.672,00	9.078.504,00	57.840.485,00	3.132.101,00	1.625.923,00	4.758.024,00	62.598.509,00
		LANPASA	43.887.666,00	6.000.000,00	35.097.309,00	24.676.547,00	9.078.504,00	68.852.360,00	3.132.101,00	2.936.196,00	6.068.297,00	74.920.657,00
		BANGKAL	67.171.645,00	6.000.000,00	35.097.309,00	37.768.340,00	9.078.504,00	81.944.153,00	3.132.101,00	4.493.954,00	7.626.055,00	89.570.208,00
		TABIKU	247.539.662,00	6.000.000,00	35.097.309,00	139.183.165,00	9.078.504,00	183.358.978,00	3.132.101,00	16.561.035,00	19.693.136,00	203.052.114,00
			SUBTOTAL	453.719.303,00	30.000.000,00	175.486.545,00	255.110.428,00	45.392.520,00	475.989.493,00	15.660.505,00	30.354.911,00	46.015.416,00
4	DANAU SEMBULUH	TELAGA PULANG	14.710.337,00	6.250.000,00	35.097.309,00	8.271.124,00	9.456.775,00	52.825.208,00	3.132.101,00	984.159,00	4.116.260,00	56.941.468,00
		CEMPAKA BARU	548.606,00	6.250.000,00	35.097.309,00	308.462,00	9.456.775,00	44.862.546,00	3.132.101,00	36.703,00	3.168.804,00	48.031.350,00
		PALINGKAU	988.887,00	6.250.000,00	35.097.309,00	556.017,00	9.456.775,00	45.110.101,00	3.132.101,00	66.159,00	3.198.260,00	48.308.361,00
		ULAK BATU	1.835.742,00	6.250.000,00	35.097.309,00	1.032.175,00	9.456.775,00	45.586.259,00	3.132.101,00	122.815,00	3.254.916,00	48.841.175,00
		PAREN	1.140.000,00	6.250.000,00	35.097.309,00	640.983,00	9.456.775,00	45.195.067,00	3.132.101,00	76.268,00	3.208.369,00	48.403.436,00
		BANUA USANG	3.099.921,00	6.250.000,00	35.097.309,00	1.742.980,00	9.456.775,00	46.297.064,00	3.132.101,00	207.392,00	3.339.493,00	49.636.557,00
		SEMBULUH I	171.305.525,00	6.250.000,00	35.097.309,00	96.319.293,00	9.456.775,00	140.873.377,00	3.132.101,00	11.460.777,00	14.592.878,00	155.466.255,00
		SEMBULUH II	310.600.642,00	6.250.000,00	35.097.309,00	174.640.218,00	9.456.775,00	219.194.302,00	3.132.101,00	20.779.976,00	23.912.077,00	243.106.379,00
			SUBTOTAL	504.229.660,00	50.000.000,00	280.778.472,00	283.511.252,00	75.654.200,00	639.943.924,00	25.056.808,00	33.734.249,00	58.791.057,00
5	HANAU	TANJUNG HANAU	1.017.773,00	7.142.857,00	35.097.309,00	572.259,00	10.807.742,00	46.477.310,00	3.132.101,00	68.091,00	3.200.192,00	49.677.502,00
		PARANG BATANG	1.149.005,00	7.142.857,00	35.097.309,00	646.046,00	10.807.742,00	46.551.097,00	3.132.101,00	76.871,00	3.208.972,00	49.760.069,00
		BAHAUR	2.876.400,00	7.142.857,00	35.097.309,00	1.617.302,00	10.807.742,00	47.522.353,00	3.132.101,00	192.438,00	3.324.539,00	50.846.892,00
		PEMBUANG HULU I	187.201.973,00	7.142.858,00	35.097.309,00	105.257.327,00	10.807.744,00	151.162.380,00	3.132.101,00	12.524.290,00	15.656.391,00	166.818.771,00
		PEMBUANG HULU II	23.176.776,00	7.142.857,00	35.097.309,00	13.031.515,00	10.807.742,00	58.936.566,00	3.132.101,00	1.550.585,00	4.682.686,00	63.619.252,00
		DERANGGA	8.822.303,00	7.142.857,00	35.097.309,00	4.960.482,00	10.807.742,00	50.865.533,00	3.132.101,00	590.234,00	3.722.335,00	54.587.868,00
		PARING RAYA	1.350.000,00	7.142.857,00	35.097.309,00	759.059,00	10.807.742,00	46.664.110,00	3.132.101,00	90.318,00	3.222.419,00	49.886.529,00
	SUBTOTAL	225.594.230,00	50.000.000,00	245.681.163,00	126.843.990,00	75.654.196,00	448.179.349,00	21.924.707,00	15.092.827,00	37.017.334,00	485.196.883,00	

6	DANAU SELULUK	ASAM BARU	29.870.068,00	5.000.000,00	35.097.309,00	16.794.927,00	7.565.420,00	59.457.656,00	3.132.101,00	1.998.383,00	5.130.484,00	64.588.140,00
		TANJUNG HARA	6.147.244,00	5.000.000,00	35.097.309,00	3.456.387,00	7.565.420,00	46.119.116,00	3.132.101,00	411.266,00	3.543.367,00	49.662.483,00
		TANJUNG PARING	1.850.635,00	5.000.000,00	35.097.309,00	1.040.549,00	7.565.420,00	43.703.278,00	3.132.101,00	123.812,00	3.255.913,00	46.959.191,00
		TANJUNG RANGAS II	837.000,00	5.000.000,00	35.097.309,00	470.616,00	7.565.420,00	43.133.345,00	3.132.101,00	55.997,00	3.188.098,00	46.321.443,00
		RUNGAU RAYA	114.175.599,00	5.000.000,00	35.097.309,00	64.197.071,00	7.565.420,00	106.859.800,00	3.132.101,00	7.638.639,00	10.770.740,00	117.630.540,00
		PANIMEA RAYA	480.000,00	5.000.000,00	35.097.309,00	269.887,00	7.565.420,00	42.932.616,00	3.132.101,00	32.113,00	3.164.214,00	46.096.830,00
		SUBTOTAL	153.360.546,00	30.000.000,00	210.583.854,00	86.229.437,00	45.392.520,00	342.205.811,00	18.792.606,00	10.260.210,00	29.052.816,00	371.256.627,00

Handwritten signature or initials

Handwritten mark or signature



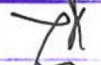



	BUNTUT SAPAU	2.167.095,00	2.000.000,00	35.097.309,00	1.218.484,00	3.026.168,00	39.341.961,00	3.132.101,00	144.984,00	3.277.085,00	42.619.046,00
	TUMBANG DARAP	4.433.941,00	2.000.000,00	35.097.309,00	2.493.054,00	3.026.168,00	40.616.531,00	3.132.101,00	296.641,00	3.428.742,00	44.045.273,00
	TUMBANG KASAI	1.114.219,00	2.000.000,00	35.097.309,00	626.487,00	3.026.168,00	38.749.964,00	3.132.101,00	74.544,00	3.206.645,00	41.956.609,00
	TUMBANG SETAWAI	568.016,00	2.000.000,00	35.097.309,00	319.376,00	3.026.168,00	38.442.853,00	3.132.101,00	38.001,00	3.170.102,00	41.612.955,00
	TUMBANG SEPAN	1.193.449,00	2.000.000,00	35.097.309,00	671.035,00	3.026.168,00	38.794.512,00	3.132.101,00	79.844,00	3.211.945,00	42.006.457,00
	RIAM BATANG	1.268.843,00	2.000.000,00	35.097.309,00	713.427,00	3.026.168,00	38.836.904,00	3.132.101,00	84.888,00	3.216.989,00	42.053.893,00
	TUMBANG TABERAU	474.633,00	2.000.000,00	35.097.309,00	267.023,00	3.026.168,00	38.390.500,00	3.132.101,00	31.881,00	3.163.982,00	41.554.482,00
	TANJUNG PAKU	1.860.338,00	2.000.000,00	35.097.309,00	1.046.005,00	3.026.168,00	39.169.482,00	3.132.101,00	124.461,00	3.256.562,00	42.426.044,00
	SUBTOTAL	36.701.296,00	40.000.000,00	701.946.180,00	20.636.041,00	60.523.360,00	783.105.581,00	62.642.020,00	2.455.328,00	65.097.548,00	848.203.129,00
	TOTAL	3.027.426.797,00	375.000.000,00	3.404.438.973,00	1.702.219.636,00	567.406.475,00	5.674.065.084,00	303.813.797,00	202.542.669,00	506.356.466,00	6.180.421.550,00

Keterangan :

*) Target Data PBB P2 TA. 2022 sesuai tarikan tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI SERUYAN,

 YULHAIDIR

TELAAH	PARAF
KAB	
SE	
KE	
K	
K	
K	

PERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
BAG	